



On Papua

Discussion Document

XXXX

02 Maret 2017

Prologue

- "Peperangan" Indonesia dalam menghadapi berbagai tekanan dunia internasional yang berhubungan dengan Papua sudah menjadi momok nasional sejak jaman rejim Soeharto sampai dengan hari ini;
- *Key Themes* yang digaungkan oleh 'pihak lawan' selalu sama:
 1. Human Rights Violations
 2. Poverty
- Kenyataannya pelanggaran HAM dan Kemiskinan merupakan tantangan universal di banyak negara, termasuk negara-negara maju seperti US, China, Australia dll, dan mereka berhasil mengalihkan perhatian dunia. Walaupun demikian kedua isu di atas tidak serta merta hilang dengan sendirinya.
- Pertanyaan utamanya "Bagaimana negara-negara besar tersebut bisa mengalihkan perhatian publik internasional atas pelanggaran HAM dan kemiskinan yang terjadi di wilayah mereka?"
- Jawaban *simple* nya: Mereka Membangun Berbagai Program Strategis dengan *High Global Visibility* yang mengalihkan perhatian dunia. Mereka dan Indonesia adalah negara-negara besar. Kalau mereka mampu maka kita pun mampu!
- Kita sudah terlalu sering membangun retorika dengan tingkat keberhasilan *delivery* yang minim. Kalau pun ada keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, gaung-nya tetap mudah dikalahkan dengan kedua *Key Themes* di atas. Kenapa demikian? Karena kedua thema di atas adalah *Universal Themes*.
- Solusi terbaik untuk meng-*counter* serangan lawan adalah dengan membangun "Medan Peperangan" baru dimana *the rules of engagement* nya kita yang *define* sehingga pihak lawan harus tunduk pada *terms and conditions* yang kita bangun. Lawanlah dengan Program yang dapat mengangkat berbagai *Universal Themes* yang bisa dibangun dan dicapai dalam waktu singkat di Papua dengan mengandalkan *Collaborative Network* berbasis *Cultural & Regional Approaches*.

Leveraging Social Assets

- Jauh sebelum Papua menjadi bagian dari NKRI, pengaruh orang Maluku di wilayah Papua sudah terbangun berdasarkan latar belakang budaya, agama dan kedekatan regional.
- Orang Maluku sudah menjadi *The Big Brother* bagi orang Papua. *This is very true particularly for the Kei people* karena dari semua sub-etnis yang ada di Maluku hanya orang Kei lah yang memilih *the true spirit of adventures*. Oleh karena itu kita bisa mendapat komunitas orang Kei di berbagai pelosok Indonesia Timur, mulai dari Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat sampai dengan NTT. Saat ini sudah banyak orang Kei yang menjadi pejabat Eselon I & II di tingkat Propinsi & Kabupaten/Kota di Papua. Bahkan ada dari mereka yang menjadi Kepala Suku / Kepala Desa di Papua! Ini adalah *SOCIAL ASSETS* Maluku bagi Papua yang tidak dimiliki oleh etnis lain di Indonesia.
- Berangkat dari kenyataan di atas, maka seharusnya Maluku bisa dijadikan *Epicentrum* bagi pembahasan dan pembangunan inisiatif-inisiatif strategis bagi Papua yang sedapat mungkin dikolaborasikan dengan Maluku. Di sini diperlukan inisiatif strategis seperti 'Gerakan Melanesia' yang dibatasi hanya pada Maluku & Papua dan didorong melalui Program-Program yang memiliki *Universal Themes*.
- *Starting Point*-nya adalah pembangunan *Epicentrum Papua* di Maluku. Keberhasilan Program-Program yang terkait dengan Papua bergantung pada keberhasilan pembangunan *Epicentrum* tersebut. Sudah barang tentu *Epicentrum* tersebut tidak boleh memakai label Papua tetapi harus memakai label "MELANESIA" sehingga regional coverage-nya mencakup Maluku dan orang-orang Maluku bisa menjadi *Key Drivers* dalam setiap program yang akan dijalankan.

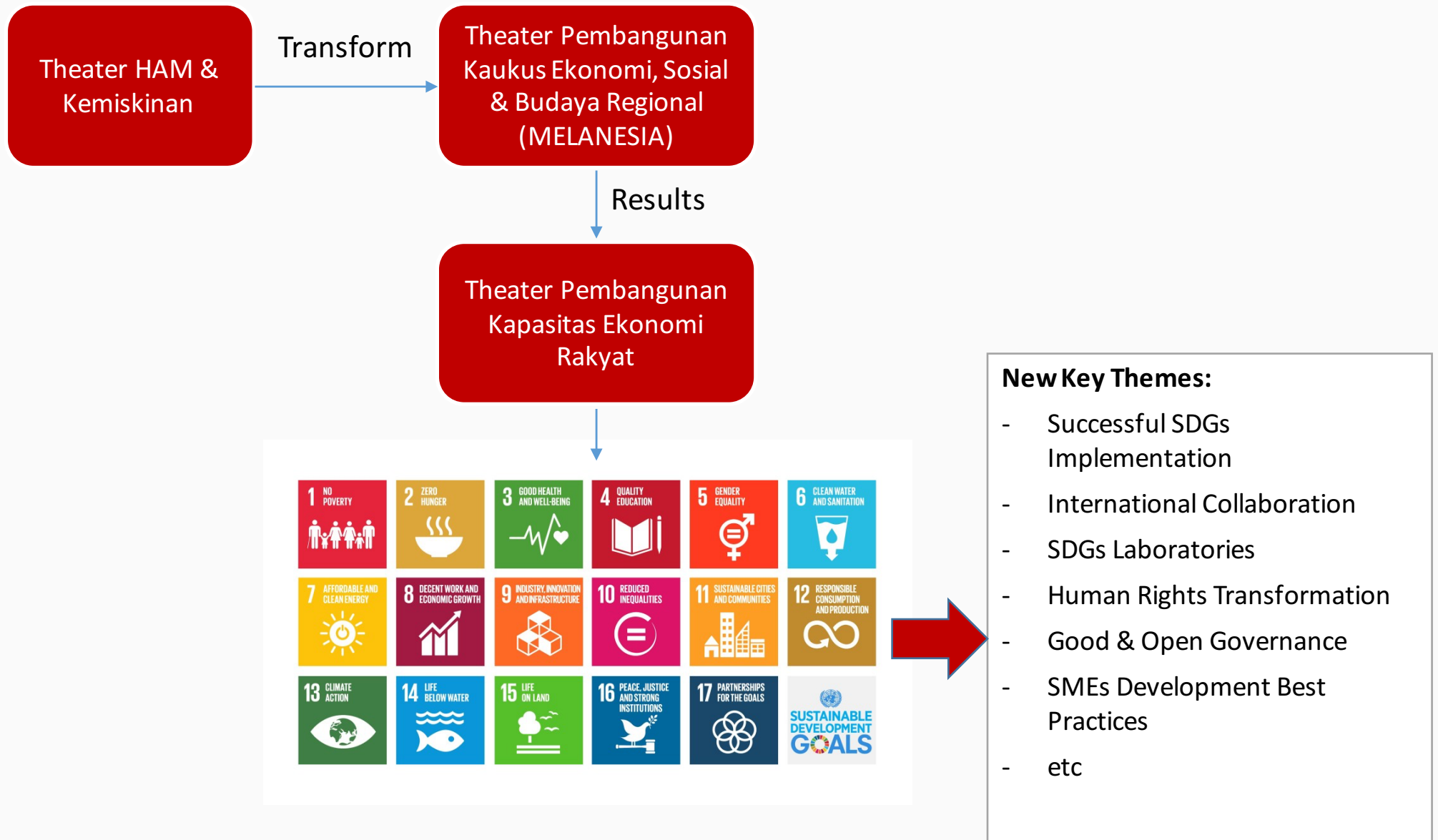
Leveraging Social Assets

- Lantas bagaimana dengan risiko gerakan RMS di Maluku? Risikonya sangat kecil karena seiring dengan peningkatan pembangunan di Maluku maka euphoria RMS pun semakin hilang. Kondisi Maluku yang “Terpecah Belah” oleh politik internal regional Maluku membuat gerakan RMS semakin tidak relevan. Orang Kei, Orang Seram, Orang Tenggara Jauh masing2 membangun identitas sub-etnisnya masing2.
- Dengan semakin besarnya gerakan pembangunan jati diri masing-masing sub-etnis membuat Maluku menjadi lahan yang menarik untuk gerakan “Melanesia” yang dapat menjadi *Common Platform* untuk pembangunan Ekonomi-Sosial masing-masing daerah yang berada di dalam gerakan tersebut.
- Membangun Platform/ Gerakan Melanesia tanpa *Strategic Program* yang memiliki *Universal Themes* adalah usaha yang sia-sia.
- *Common Platform* seperti apa yang bisa dibangun? Jawabannya adalah Membangun Program Klaster Industri Berbasis Komunitas yang dijalankan lintas wilayah karena adanya kebutuhan untuk mencapai *Economies of Scale* dan *Economies of Scope*. Ini standar measurement setiap industri yang kompetitif.
- Program tersebut di atas kemudian di hubungkan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang merupakan *Universal Commitment* seluruh negara anggota PBB. Kita angkat & jawab setiap target goals (17 goals) yang ada di dalam SDGs dalam waktu singkat (3-6 bulan) melalui program ekonomi rakyat. Melalui program2 ini kita tuntut partisipasi dunia internasional.
- Banyak isu2 baru yang kemudian bisa diangkat dari program2 ini seperti isu lingkungan hidup (untuk menekan Freeport dan perusahaan2 ESDM yang beroperasi di wilayah Maluku & Papua), isu Gender Equality vs Culture, Isu Human Rights yg dapat ditandingi dengan isu poverty alleviation dll.
- Kuncinya ada pada Pembangunan & Pengemasan Berbagai PR Portfolio yang diangkat dari program yang dijalankan untuk berbagai kebutuhan, baik untuk konsumsi internasional, nasional maupun lokal!

Leveraging Social Assets

- Program Kluster Industri Berbasis Rakyat menjadi Key Driver bagi masuknya:
 - Industri Transportasi & Logistik
 - Industri Energi (Pembangkit Listrik)
 - Industri Pendidikan & Riset
 - Industri Tenaga Kerja
 - Industri Pengemasan
 - Industri Telekomunikasi
 - Industri Perbankan
 - Industri Pengolahan
- Semua bisa dicapai dalam jangka waktu 3-6 bulan. Maksimal 9 bulan. Caranya adalah kita fokus pada pembangunan basis-basis industri rakyat yang memproduksi komoditas2 jangka pendek (yang dapat dipanen dalam waktu 3-6 bulan maksimal). Yang secara parallel diikuti dengan pembangunan industri pengolahannya.
- KENAPA SDGs MENJADI PENTING? Karena sampai dengan hari ini belum ada satu negara pun di dunia ini yang berhasil membangun/ mengimplementasikan Program yang dapat menjawab tantangan SDGs. Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa mencapai keberhasilan implementasi SDG. (lihat beberapa contoh di www.negerimandiri.com)

The New “Rules of Engagement”



Key Objectives

- Creating International Dependencies on SDGs successes in Melanesia. The trickling down effects of this would be:
 1. Terbangunnya posisi tawar Indonesia di tingkat global dari aspek Ekonomi (Bisnis), Jaringan, Knowledge & Tangible Results;
 2. Terbangunnya Melanesia Caucus yang bisa secara otomatis menjadi “Spearhead” tandingan terhadap perjuangan OPM dll;
 3. Terbangunnya New Pressure Groups terhadap perusahaan tambang & energi dalam konteks Lingkungan Hidup dan Shareholders Equities;
 4. Caucus Melanesia bisa dijadikan national & global best practices – We are creating & delivering new standards;
 5. Terbangunnya Regional & Global Supply Chain Network yang secara otomatis akan menciptakan ketergantungan negara2 besar seperti China, Australia, US dll atas komoditas yang kita produksi secara Mass Scale. Dengan ketersediaan lahan yang sangat besar, proses produksi bisa dibangun secara *On-Demand*, sizeable bergantung pada kepentingan strategis dalam membangun posisi tawar. Volume Produksi yg besar menentukan daya saing kita di pasar, bersamaan dengan itu basis produksi yang besar menciptakan pasar baru bagi produk/ komoditas internasional yang masuk ke Indonesia.

What's Next

- Let's sit down and discuss this further.